

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Tempat Penelitian

Provinsi Sumatera Selatan adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Selatan secara geografis terletak antara 1–4° Lintang Selatan dan 102–106° Bujur Timur, dan luas daerah seluruhnya adalah 87.017.41 km.

Secara administratif Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, dengan Kota Palembang sebagai ibukota provinsi. Pemerintah kabupaten/kota membawahi pemerintah kecamatan dan desa atau kelurahan. Sumatera Selatan memiliki 13 kabupaten, 4 kota madya, 212 kecamatan, 354 kelurahan, dan 2.589 desa. Pemerintahan Kabupaten/Kota tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kabupaten Ogan Komering Ulu (Ibukota Baturaja)
2. Kabupaten OKU Timur (Ibukota Martapura)
3. Kabupaten OKU Selatan(Ibukota Muara Dua)
4. Kabupaten Ogan Komering Ilir (Ibukota Kayu Agung)
5. Kabupaten Muara Enim (Ibukota Muara Enim)
6. Kabupaten Lahat (Ibukota Lahat)
7. Kabupaten Musi Rawas (Ibukota Lubuk Linggau)
8. Kabupaten Musi Banyuasin (Ibukota Sekayu)
9. Kabupaten Banyuasin (Ibukota Pangkalan Balai)
10. Kabupaten Ogan Ilir (Ibukota Indralaya)
11. Empat Lawang (Ibukota Tebing Tinggi)
12. Kota Palembang (Ibukota Palembang)
13. Kota Pagar Alam (Ibukota Pagar Alam)

14. Kota Lubuk Linggau (Ibukota Lubuk Linggau)
15. Kota Prabumulih (Ibukota Prabumulih)
16. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Ibukota Talang Ubi)
17. Kabupaten Musi Rawas Utara (Ibukota Rupit).⁶⁵

B. Deskripsi Variabel Penelitian

1. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan kebijakan pemerintah dalam menjalankan perekonomian. Pengeluaran pemerintah tercermin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengeluaran pemerintah Sumatera Selatan yang meliputi fungsi atau bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan mengalami peningkatan dan penurunan pada tahun 2011-2018. Pengeluaran pemerintah Sumatera Selatan mengalami penurunan pada tahun 2012, 2013, dan 2015 yang mencapai Rp.414.708 T pada tahun 2015. Dan mengalami kenaikan pada tahun 2016-2018 sebesar Rp. 2.487.351 T.

Tabel 4.1
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Per Fungsi (dalam Jutaan Rupiah)

	Tahun	Ekonomi	Kesehatan	Pendidikan	Jumlah
Palembang	2011	87.921	130.131	809.678	1.027.730
	2012	92.746	166.615	1.106.632	1.365.993
	2013	112.428	167.827	1.222.086	1.502.341
	2014	120.692	282.701	1.176.111	1.579.504
	2015	97.097	36.390	48.789	182.276

⁶⁵ Badan Pusat Statistik, Sumatera Selatan, "Geografis", <www.sumsel.bps.go.id> Diakses pada tanggal 1 Februari 2020.

	2016	113.261	366.568	1.208.113	1.687.942
	2017	105.218	441.621	1.191.082	1.737.921
	2018	122.382	417.295	1.162.518	1.702.195
Muara Enim	2011	80.053	156.129	482.977	719.159
	2012	156.152	232.675	516.157	904.984
	2013	141.015	178.107	560.861	879.983
	2014	171.579	189.273	558.725	919.577
	2015	146.198	70.566	63.780	280.544
	2016	245.192	294.066	567.152	1.106.410
	2017	140.305	401.307	604.421	1.146.033
	2018	162.275	354.713	603.628	1.120.616
Musi Banyuasin	2011	168.025	193.899	537.899	899.823
	2012	285.033	208.591	580.800	1.074.424
	2013	441.776	245.052	637.797	1.324.625
	2014	465.846	332.104	615.521	1.413.471
	2015	136.033	52.140	105.085	293.258
	2016	173.906	324.177	676.727	1.174.810
	2017	120.961	378.134	668.222	1.167.317
	2018	140.141	354.896	685.669	1.180.706
Banyuasin	2011	107.057	88.183	369.796	565.036
	2012	138.074	111.554	543.847	793.475
	2013	183.563	118.304	574.524	876.391
	2014	212.230	156.569	647.264	1.016.063
	2015	116.533	58.941	59.039	234.513
	2016	129.895	237.238	545.911	913.044
	2017	101.277	219.273	715.539	1.036.089
	2018	82.994	260.967	623.609	967.570
Sumatera Selatan	2011	335.396	296.520	255.982	887.898
	2012	367.238	238.378	249.203	854.819
	2013	372.880	176.955	237.021	786.856
	2014	394.813	179.933	251.226	825.972
	2015	245.698	53.690	115.320	414.708

	2016	294.504	188.938	130.162	613.604
	2017	281.945	372.597	1.597.165	2.251.707
	2018	296.405	433.163	1.757.783	2.487.351

Sumber: DJPK, data diolah.

2. Upah Minimum Kabupaten/Kota

Upah minimum kabupaten/kota adalah upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/kota. Penetapan upah minimum kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur yang penetapannya harus lebih besar dari upah minimum propinsi. Penetapan upah minimum ini dilakukan setiap satu tahun sekali dan di tetapkan selambat-lambatnya 40 hari sebelum tanggal berlakunya yaitu 1 Januari.

Kabupaten/kota yang sudah memiliki SK UMK sendiri hanya empat kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Kota Palembang sudah lebih dulu mempunyai SK UMK pada tahun 2011 sedangkan kabupaten lainnya seperti Kabupaten Muara Enim, Banyuasin, dan Musi banyuasin baru memiliki SK pada tahun 2016. Bagi kabupaten/kota yng belum memiliki SK UMK sendiri maka akan mengikuti prosedur Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan. Setiap tahun upah minimum kabupaten/kota maupun provinsi selalu mengalami kenaikan.

Upah minimum kabupaten/kota di Sumatera Selatan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 upah minimum Kota Palembang sebesar Rp. 2.700.360, Kabupaten Muara Enim Rp. 2.694.240., Kabupaten Banyuasin Rp. 2.637.642 dan Kabupaten Musi Banyuasin Rp.2.684.650.

Tabel 4.2**Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2011-2018 (Rupiah)**

Tahun	Palembang	Muara Enim	Banyuasin	Musi Banyuasin	Sumatera Selatan
2011	1.095.831	1.048.440	1.048.440	1.048.440	1.048.440
2012	1.271.000	1.195.220	1.195.220	1.195.220	1.195.220
2013	1.450.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
2014	1.850.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
2015	2.053.000	1.974.346	1.974.346	1.974.346	1.974.346
2016	2.294.000	2.289.491	2.241.936	2.281.000	2.206.000
2017	2.484.000	2.388.000	2.426.311	2.388.000	2.388.000
2018	2.700.360	2.694.240	2.637.642	2.684.650	2.595.994

Sumber: Disnakertrans Sumatera Selatan

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output dalam jangka panjang yang diukur dengan memperhatikan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan cerminan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi pula, yang artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin baik pula perekonomian masyarakat suatu daerah atau negara tersebut.

Jumlah pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2011 sampai 2018. Peningkatan terjadi pada tahun 2011-2012. Pada tahun 2013 sampai tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan mengalami penurunan yakni sebesar 4,50 pada tahun 2015. Dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2016-2018 menjadi sebesar 6,04% pada tahun 2018.

Tabel 4.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2011-2018 (Persentase)

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Palembang	6.39	7.75	5.85	5.24	5.44	5.76	6.16	6.69
Muara Enim	12.28	8.27	6.67	3.13	7.62	5.24	8.72	8.65
Musi Banyuasin	3.62	7.25	3.95	4.67	2.28	2.41	3.02	3.23
Banyuasin	5.42	6.15	6.18	5.14	5.56	5.88	5.08	5.14
Sumatera Selatan	6.36	6.83	5.31	4.70	4.50	5.03	5.51	6.04

Sumber: BPS, Sumatera Selatan.

4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosial ekonomi suatu daerah atau negara yang mengombinasikan pencapaian pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil perkapita yang disesuaikan.

Indeks pembangunan manusia Sumatera Selatan tertinggi terletak pada tahun 2018 sebesar 69,39%. Hal ini dikarenakan indeks pembangunan manusia Sumatera Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 4.4
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2011-2018 (Persentase)

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia				
	Palembang	Muara Enim	Musi Banyuasin	Banyuasin	Sumatera Selatan
2011	74.08	62.82	62.56	61.04	65.12
2012	74.74	63.34	63.27	61.69	65.79
2013	75.49	64.34	64.18	62.42	66.16
2014	76.02	65.02	64.93	63.21	66.75
2015	76.29	65.82	65.76	64.15	67.46

2016	76.59	66.71	66.45	65.01	68.24
2017	77.22	67.63	66.96	65.85	68.86
2018	77.89	68.28	67.57	66.40	69.39

Sumber: BPS, Sumatera Selatan.

C. Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia

Tabel 4.5
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel – Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Indeks pembangunan manusia	32	61.04	77.89	67.6166	5.26354
Pengeluaran pemerintah upah minimum kabupaten/kota	32	17.59	34.57	24.9984	5.53547
Pertumbuhan ekonomi	32	2.28	12.28	5.7762	2.07433
Valid N (listwise)	32				

Sumber : SPSS Versi 24, Data diolah oleh Peneliti, 2020

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 32 observasi. Sehingga dapat dijelaskan hasil sebagai berikut:

- a. Variabel pengeluaran pemerintah memiliki nilai minimum 17,59 dan maksimum 34,57 dengan nilai rata-rata 24.9984 sedangkan

standar deviasinya 5.53547 dengan jumlah sampel sebanyak 32 data.

- b. Variabel upah minimum kabupaten/kota memiliki nilai minimum 24,55 dan maksimum 25.14 dengan nilai rata-rata 10.2776 sedangkan standar deviasinya 4.39998 dengan jumlah sampel sebanyak 32 data.
- c. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai minimum 2.28 dan maksimum 12,28 dengan nilai rata-rata 5,7762 sedangkan standar deviasinya 2,07433 dengan jumlah sampel sebanyak 32 data.
- d. Variabel indeks pembangunan manusia memiliki nilai minimum 61.04 dan maksimum 77.89 dengan nilai rata-rata 67.6166 sedangkan standar deviasinya 5.26354 dengan jumlah sampel sebanyak 32 data.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menyatakan hubungan fungsional antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini model persamaan regresi linier berganda yang disusun untuk mengetahui pengaruh antara Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia secara bersama-sama adalah $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$. Hasil persamaan regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	-109,871	31.079		-3.535	.001
	Pengeluaran pemerintah	.322	.113	.339	2.859	.008
	upah minimum kabupaten/kota	6,767	1.303	.616	5.192	.000
	Pertumbuhan ekonomi	.045	.252	.018	.180	.858

a. Dependent Variable: indeks pembangunan manusia

Sumber : SPSS Versi 24, Data diolah oleh Peneliti, 2020

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa diperolehnya persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -109,871 + 0,322X_1 + 6,767X_2 + 0,045X_3 + e$$

Keterangan:

- a. Berdasarkan tabel output diatas menjelaskan bahwa nilai konstanta sebesar -109,871 yang berarti jika variabel independen (pengeluaran pemerintah, upah minimum kabupaten/kota, dan pertumbuhan ekonomi) memiliki nilai nol maka indeks pembangunan ekonomi meningkat -109,871 satuan artinya jika pengeluaran pemerintah, upah minimum kabupaten/kota, dan pertumbuhan ekonomi meningkat maka indeks pembangunan ekonomi juga mengalami peningkatan.
- b. Koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah sebesar 0,322 yang artinya apabila pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan satuan maka indeks pembangunan manusia akan mengalami kenaikan sebesar 0,322 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
- c. Koefisien regresi variabel upah minimum kabupaten/kota sebesar 6,767 yang artinya apabila upah minimum kabupaten/kota mengalami kenaikan satuan maka indeks pembangunan manusia

akan mengalami kenaikan sebesar 6,767 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

- d. Koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,045 yang artinya apabila pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan satuan maka indeks pembangunan manusia akan mengalami kenaikan sebesar 0,045 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dalam variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas ini peneliti menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test. Berikut disajikan hasil dari Kolmogorov-Smirnov Test dalam tabel 4.7:

Tabel 4.7
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		32
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	.95038193
Most Extreme	Absolute	.149
Differences	Positive	.149
	Negative	-.072
Test Statistic		.149
Asymp. Sig. (2-tailed)		.070 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : SPSS Versi 24, Data diolah oleh Peneliti, 2020

Dari Tabel 4.7 melihat output SPSS dari uji normalitas di atas dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengeluaran pemerintah, upah minimum kabupaten/kota, dan pertumbuhan ekonomi memiliki tingkat signifikan diatas 0,05 yaitu $0.070 > 0.05$ artinya data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki distribusi yang normal dan menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Linieritas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah antara variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian dengan SPSS dengan menggunakan metode Lagrange Multiplier merupakan salah satu cara untuk menghitung linearitas dalam model regresi, dengan membandingkan nilai C^2 hitung $< C^2$ tabel, maka variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear.

Tabel 4.8

Uji Linieritas

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.070 ^a	.005	-.102	2.89982483

a. Predictors: (Constant), PE_Kuadrat, PP_Kuadrat, UMK_Kuadrat

Sumber : SPSS Versi 24, Data diolah oleh Peneliti, 2020

Dari tabel 4.8 hasil output menunjukkan bahwa nilai R Square adalah 0,008. Dengan jumlah n observasi sebanyak 32, maka besarnya nilai C^2 hitung pada persamaan ini adalah $32 \times 0,005 = 0,16$. Nilai ini dibandingkan dengan nilai C^2 tabel dengan df hitung = $32 - 3 = 29$ dan tingkat signifikansinya 0,05 didapat nilai C^2 tabel sebesar 46,194. Oleh karena nilai C^2 hitung $< C^2$ tabel, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan ini adalah model linear.

c. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki hubungan korelasi antar variabel independen dan menguji apakah model regresi terjadi linear sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebasnya. Besarnya tingkat kolinieritas yang masih dapat ditolerir yaitu, $Tolerance > 0,10$ dan $Variance Inflation Factor (VIF) < 10$. Berikut disajikan hasil pengamatan SPSS uji multikolinieritas:

Tabel 4.9
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-109,871	31.079		-3.535	.001		
Pengeluaran pemerintah	.322	.113	.339	2.859	.008	.700	1.429
upah minimum kabupaten/kota	6,767	1.303	.616	5.192	.000	.698	1.432

Pertumbuhan ekonomi	.045	.252	.018	.180	.858	.997	1.003
---------------------	------	------	------	------	------	------	-------

a. Dependent Variable: indeks pembangunan manusia

Sumber : SPSS Versi 24, Data diolah oleh Peneliti, 2020

Dari Tabel 4.9 hasil uji multikolinearitas diatas diperoleh hasil bahwa hasil perhitungan masing-masing variabel bebas memiliki nilai Tolerance lebih dari 0,10. Hasil hitungan masing-masing variabel bebas juga memiliki nilai VIF dibawah 10. Dengan demikian, hasil uji pada tabel diatas membuktikan bahwa pada model regresi ini tidak terdapat gejala multikolinearitas.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedaktisitas bertujuan untuk mengetahui bahwa model regresi tidak terjadi heterokedaktisitas dengan menggunakan uji Gletser. Uji yang dilakukan dengan menggunakan nilai absolute residual terhadap variabel independen. Hasil dari uji Gletser menunjukkan tidak adanya heterokedaktisitas apabila dari nilai signifikannya diatas 5% atau 0,05.

Tabel 4.10
Uji heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-16.174	15.389		-1.051	.302
PP	.092	.056	.328	1.644	.111
UMK	.633	.645	.196	.981	.335
PE	.052	.125	.070	.419	.679

a. Dependent Variable: ABRES

Sumber : SPSS Versi 24, Data diolah oleh Peneliti, 2020

Berdasarkan Tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan untuk variabel pengeluaran pemerintah sebesar 0,111, variabel upah minimum kabupaten/kota sebesar 0,335 dan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,679 dimana semua variabel tersebut nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

e. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu (error) pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya jika terjadi kolerasi maka ada problem autokorelasi cara yang dapat untuk mendeteksi ada tidak nya autokorelasi adalah uji Durbin-Watson (DW Test). Berikut ketentuan hasil pengamatan spss uji autokorelasi menurut Singgi Santoso.

- 1) Jika Angka DW dibawah -2 berarti ada korelasi positif.
- 2) Jika DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
- 3) Jika angka DW diatas +2 berarti terdapat autokorelasi.⁶⁶

Tabel 4.11

**Uji autokorelasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.851 ^a	.725	.695	2.90694	1.230

a. Predictors: (Constant), pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, upah minimum kabupaten/kota

b. Dependent Variable: indeks pembangunan manusia

Sumber : SPSS Versi 24, Data diolah oleh Peneliti, 2020

⁶⁶ Santoso dan Singgih. *Mengenal SPSS 22 from Basic to Expert Skill*. (Jakarta : PT Efek Media Komutindo, 2015), hlm. 57.

Berdasarkan Tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson yaitu 1,398, maka $DW = 1,230 > -2$ dan $DW = < +2$ sehingga dapat disimpulkan DW berada diantara -2 sampai +2 yang berarti tidak terjadi gejala autokorelasi pada penelitian ini.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji-T)

Uji t merupakan uji signifikan pengaruh setiap variabel antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan demikian, melalui uji t akan diketahui bagaimana pengaruh variabel independen secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia.

Tabel 4.12
Uji Parsial (Uji-T)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Std. Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-109,871	31.079		-3.535	.001
Pengeluaran pemerintah	.322	.113	.339	2.859	.008
upah minimum kabupaten/kota	6,767	1.303	.616	5.192	.000
Pertumbuhan ekonomi	.045	.252	.018	.180	.858

a. Dependent Variable: indeks pembangunan manusia

Sumber : SPSS Versi 24, Data diolah oleh Peneliti, 2020

Dengan jumlah data 32 dan jumlah variabel 3 yaitu X1, X2, dan X3 maka dapat diketahui: $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$. *Degree of freedom* (df) = (N-K-1) atau $32-3-1 = 28$. Sehingga nilai t tabel yaitu 2,048 maka:

- 1) Nilai t hitung pengeluaran pemerintah menunjukkan T hitung (2,859) > T tabel (2,048) dengan nilai signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$ maka dapat disimpulkan H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial variabel pengeluaran pemerintah dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
 - 2) Nilai t hitung upah minimum kabupaten/kota menunjukkan T hitung (5,192) > T tabel (2,048) dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial variabel upah minimum kabupaten/kota dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
 - 3) Nilai t hitung pertumbuhan ekonomi menunjukkan T hitung (0,180) < T tabel (2,048) dengan nilai signifikansi sebesar $0,858 > 0,05$ maka dapat disimpulkan H_{01} diterima dan H_{a1} ditolak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi dinyatakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
- b. Uji Simultan (Uji-F)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menggunakan *level of significance* 5%.

Tabel 4.13
Uji Simultan (Uji-F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	622.243	3	207.414	24.545	.000 ^b
Residual	236.609	28	8.450		
Total	858.852	31			

a. Dependent Variable: indeks pembangunan manusia

b. Predictors: (Constant), pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, upah minimum kabupaten/kota

Sumber : SPSS Versi 24, Data diolah oleh Peneliti, 2020

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, maka dapat diketahui bahwa variabel independen pengeluaran pemerintah, upah minimum kabupaten/kota, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen indeks pembangunan manusia. Hal ini di buktikan dengan nilai F_{hitung} sebesar 24,545 dan nilai F_{tabel} sebesar 2,947 dimana diketahui $F_{hitung} > F_{tabel}$, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga artinya semua variabel independen secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan

untuk memprediksi variasi variabel dependen. Penelitian ini menggunakan nilai Adjusted R^2 yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.851 ^a	.725	.695	2.90694

a. Predictors: (Constant), pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, upah minimum kabupaten/kota

b. Dependent Variable: indeks pembangunan manusia

Sumber : SPSS Versi 24, Data diolah oleh Peneliti, 2020

Berdasarkan tabel 4.14 diatas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,695 atau 69,5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengeluaran pemerintah (X1), upah minimum kabupaten/kota (X2), dan pertumbuhan ekonomi (X3) mampu mempengaruhi variabel indeks pembangunan manusia (Y) sebesar 69,5% dan sisanya sebesar 30,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui tingkat keerataan dari hubungan dua variabel. Pada tabel 4.14 menunjukkan nilai koefisien korelasi adalah 0,851 yang berarti dua variabel memiliki hubungan yang kuat.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil uji statistik yang menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $2,859 > 2,048$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh dan signifikan terhadap variabel indeks pembangunan manusia Sumatera Selatan tahun 2011-2018. Hal ini mengindikasikan pentingnya pengeluaran pada fungsi ekonomi, kesehatan dan pendidikan dalam pembangunan ekonomi. Yang sebagaimana diketahui bahwa faktor kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang dalam hal daya beli merupakan komponen dari indeks pembangunan manusia.

Hal ini juga memperkuat hasil penelitian Ariansyah yang menjelaskan program pemerintah dalam fungsi ekonomi mampu meningkatkan pendapatan perkapita atau pertumbuhan ekonomi. Belanja ekonomi yang merupakan belanja pemerintah terhadap kegiatan ekonomi antara lain seperti perdagangan, UMKM, tenaga kerja, pertanian, pertambangan, bahan bakar, transportasi dan lain sebagainya sesuai dengan analisis mampu memberikan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi yang dicerminkan dalam peningkatan PDRB perkapita.

Ariansyah juga menjelaskan peranan ilmu pengetahuan sebagai modal sumber daya manusia dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Pendidikan yang semakin tinggi memperluas pengetahuan dan rasionalitas cara berpikir manusia. Hal ini memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi manusia untuk menerima dan memproses informasi dengan lebih cepat dan

terstruktur sehingga meningkatkan produksi dan pembangunan ekonomi.

Nur Baeti juga menyatakan investasi dalam hal pendidikan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Begitu juga dengan pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan yang di keluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Baeti (2013), Dewi dan Ady (2017), dan Ariansyah (2018) yang menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2012) dan Merang Kahang, M. Saleh, dan Rachmad Budi Suharto (2016) yang menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

2. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Laila Ramadhani dengan adanya kenaikan upah minimum dapat memberikan dampak terhadap indeks pembangunan manusia. Dimana kenaikan upah minimum ini akan mendorong terjadinya peningkatan dalam daya beli masyarakat. Upah minimum kabupaten/kota merupakan komponen dari pendapatan seseorang

yang tinggal di suatu daerah sehingga tingkat upah merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan kesejahteraan masyarakat dari suatu negara.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa upah minimum kabupaten/kota berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini sesuai dengan hasil uji statistik yang menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $5,192 > 2,048$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Semakin tinggi upah minimum yang dihasilkan atau diperoleh maka akan semakin tinggi pula tingkat ekonomi masyarakat terutama dalam hal daya beli yang merupakan komponen dari indeks pembangunan manusia.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chalid dan Yusuf (2014), Zainuddin (2015), dan Herman (2018) yang menyebutkan bahwa upah minimum kabupaten/kota berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nurcholis (2014) yang menyebutkan bahwa upah minimum kabupaten/kota tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil uji statistik yang menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu $0,180 < 2,048$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,858 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel indeks pembangunan manusia Sumatera Selatan tahun 2011-2018.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan.

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga indeks pembangunan manusia di suatu daerah juga akan meningkat. Semakin tinggi pendapatan nasional atau daerah maka semakin besar kemungkinan untuk terciptanya kapasitas produksi baru yang nantinya akan menyerap tenaga kerja baru. Pendapatan yang tinggi tercermin dari tingginya pendapatan perkapita. Semakin baik pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar harapan untuk tidak mengganggu sehingga akan mendorong pemerataan pendapatan sehingga mendorong meningkatnya indeks pembangunan manusia. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi indeks pembangunan manusia secara langsung.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2012) yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Namun, hasil penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Mirza (2012), Farida (2018) dan Najmi (2019) yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

4. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Variabel independen (pengeluaran pemerintah, upah minimum kabupaten/kota, dan pertumbuhan ekonomi) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (indeks pembangunan manusia). Hal ini di buktikan dengan nilai F_{hitung} sebesar 24,545 dan nilai F_{tabel} sebesar 2,947 dimana diketahui $F_{hitung} > F_{tabel}$, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga artinya semua variabel independen secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini berarti indeks pembangunan manusia dipengaruhi oleh tiga faktor atau tiga variabel tersebut.